



Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

Demokratisasi Pasca 2019

Titi Anggraini

+62811822279, titi@perludem.org, www.perludem.org

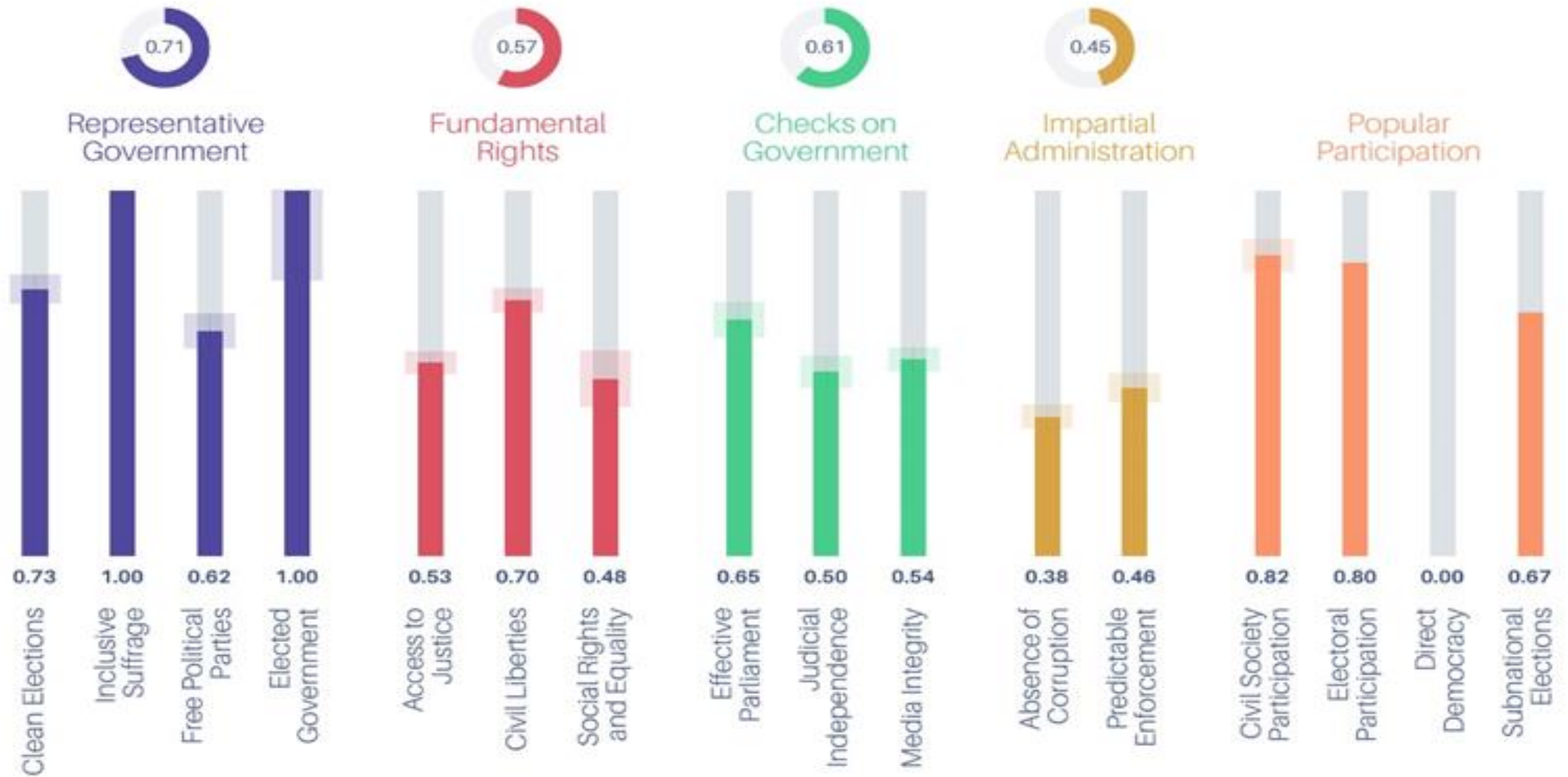
Perludem, 2018

PENGANTAR

- Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.
- *The biggest one day election in the world* (192 juta pemilih).
- *The most complex election in the world* (ukuran wilayah, geografi, penyelenggara pemilihan).
- Negara muslim demokratis terbesar di dunia.

State of Global Democracy (GSOD) Index: Indonesia

Indonesia | 2015



Key Message 1



- **Democracy is at a crossroads**
 - Global progress has been made in almost all aspects of democracy since 1975
 - At the country and regional level, in the last 5-10 years we see threats to democracy
 - **Democracy cannot be taken for granted:** it must be protected and safeguarded.

Key Message 2



- **Democratic backsliding does not weaken people's ideal of democracy**
 - How the public views and value democracy is strengthened in the face of such threats
 - *Modern democratic backsliding: When leaders increase their power by manipulating the instruments of democracy*

Tantangan Pemilu dan Demokrasi Indonesia

- Kerangka hukum pemilu belum sepenuhnya menjamin pemilu demokratis dan melindungi hak pilih warga.
- Penataan sistem elektoral belum sinkron dengan tujuan penguatan sistem pemerintahan. Desain pemilu serentak yang perlu disempurnakan. 2024 sesuai desain saat ini: Pileg Pilres bersamaan dan Pilkada Serentak Nasional pada November 2024.
- Sistem pilkada yang masih terus diperdebatkan vs penataan pilkada serentak.
- Pelembagaan parpol: partai politik yang menjauh dari fungsinya (pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen politik demokratis): menguatnya calon tunggal, keterwakilan perempuan stagnan.
- Menguatnya dinasti oligarki yang cenderung korup.
- **Politik transaksional** (jual beli tiket/kursi pencalonan (*candidacy buying*), jual beli suara pemilih (*vote buying*), dan menyuap penyelenggara/hakim pemilihan).
Uang semakin dominan, politik dibuat sangat mahal.

Tantangan Pemilu dan Demokrasi Indonesia

- **Post truth era.** “Where facts matter less than emotions in influencing decision or policy.” Ketika fakta tidak lebih penting daripada emosi yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan.
- Keberlimpahan informasi diikuti penyebaran kabar bohong (*hoax*), berita bohong (*fake news*), ujaran kebencian (mengajak melakukan kekerasan, sentimen SARA, dan penghilangan hak pilih).
- Integritas penyelenggara pemilu.
- Kampanye masih ditempatkan sebagai aktivitas populis artifisial, simbolik menunjukkan kehadiran fisik parpol atau calon, tapi belum sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik.
- Mentalitas siap menang tidak siap kalah.
- Negara kuat (Bawaslu, DKPP, dll), masyarakat sipil melemah?

Rekomendasi

- Reformasi elektoral dan kepartaian melalui penataan regulasi politik harus terus dilanjutkan.
- Institusionalisasi partai politik: penguatan pendanaan publik (alokasi dana negara untuk parpol). Dengan alokasi khusus minimal untuk kaderisasi dan rekrutmen perempuan.
- Demokratisasi internal partai: rekrutmen politik yang transparan dan partisipatif.
- Melanjutkan reformasi sistem pemilu: pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, setiap 2 tahun sekali.
- Konsolidasi pengaturan pendanaan politik untuk menjamin kompetisi yang setara: UU Keuangan Politik (pembatasan transaksi tunai, pembatasan belanja kampanye, alokasi dana negara negara untuk menjamin kompetisi yang adil-pembiayaan iklan di media massa elektronik oleh negara).
- Jaminan pada independensi dan integritas penyelenggara pemilu: melanjutkan reformasi penataan desain kelembagaan penyelenggara pemilu (kejelasan TUPOKSI dan eksistensi badan penyelenggara pemilu, ketegasan skema penegakan hukum).
- Penguatan konsolidasi masyarakat sipil dengan dukungan negara.